

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Solichin. 2005. ***Analisis Kebijakan :dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara***, Jakarta : BumiAksara
- Andersen, J.E. 1975. *Public Policy Making*. New York, N.J. Holt, Reinhart and Winston.
- Astuti, sri Juni Woro, 2009. Jurnal“**Diskresi Birokrasi**” dalam Samudra Wibawa (ed) *Administrasi Negara Isu-isu Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Christensen, Terry. 1995. ***Local Politics; Governing at the Grassroots***. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company
- Dunn, N. William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus.1995. “**Penilaian kinerja organisas ipelayanan public, Seminar kinerja organisasi sector publik, kebijakan dan penerapannya**.”Jur. ANe, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- (Ed), 2006, ***Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia***, GadjahMada University Press, Yogyakarta.
- Edwards III, George C, dan Sharkansky, I. 1978. **The policy predicament**, W.H. Freeman and Company. San Fransisco.
- Hendytio, Medelina K. 1998. “**Menunggu Hasil Pembenahan Birokrasi Kita**”. DalamJurnal ANALISIS CSIS No. 1 Tahun XXVII.
- Hoogerwerf, A. 1983.***Ilmu Pemerintahan***, Jakarta :Airlangga
- Islamy,Muh. Irfan, 1999. **Profesionalisasi Pelayanan publik**. Universitas Brawijaya, malang.
- Jones. 1991. ***Pengantar Kebijakan Publik***, Jakarta :Rajawali Press
- Kadji, Yulianto,2008, **Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Realita**, Cahaya Abadi Tulungagung

- Kunarjo.1996. **PerencanaandanPembiayaan Pembangunan**.Jakarta: UI Press
- Lipsky, M. (1980) . **Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual inpublic services**. New York: Russell Sage Foundation
- Mas;oed, Mohtar. 1994. **Politik, Birokrasi dan Pembangunan**. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Miles, Matthew B. danA.MichaelHuberman. 1992. **Quantitative Data Analysis. TerjemahanTjetjepRohendiRohidi**. Jakarta : UI-Press
- Moleong,J. Lexy. 2008. **Metodologi penelitian kualitatif**. Edisi Revisi. Penerbit PT. Remaja rosdakarya. Bandung.
- Muchan,SH, **Peradilan Adminstrasi Negara**, liberty,Yogyakarta, 1981.
- , **Sistem pengawasan Terhadap perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia**,Liberty, Yogyakarta, .2007
- Mustopadidjaya. 2003. **Manajemen Proses Kebijakan Publik**. Penerbit PT Duta pratiwi Fundation. Jakarta.
- Nurdjaman, Progo. 2002. **“ReformasiBirokrasi di Era Otonomi Daerah”**. Makalahdisampaikanpada Seminar NasionalReformasiBirokrasi di Era Otonomi Daerah,Bandung.
- Osborne, David. And Peter Plastrick, 1997. **Banishing Bureaucracy, USA**, Addison, Publishing Company, (terjemahan Abdul Rasyid), Jakarta, Ikrar Mandiri Abadi.
- Rakhmat. 2009. **Teori Administrasi dan Manajemen pubik**. Penerbit Pustaka Arif. Jakarta.
- Said, *ZainalAbidin*. 2004.,**Kebijakan Publik**(Edisi 2), Penulis: *SaidZainalAbidin*, Penerbit: SalembaHumanika
- Sjachran Basah, **Eksistensi dan Tolak Ukur Badan peradilan Administrasi di Indonesia**, Alumni, Bandung, 1989.

- Subarsono, A.G. 2008. **Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi**, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiono. 2007. **Metode penelitian kuantitatif dan Kualitatif R & D**. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sugiono. 2001. **Metode Penelitian Administrasi**, Alfabeta : Bandung
- _____. 2006. **Metode Penelitian Administrasi (Edisi Revisi)**, Alfabeta : Bandung
- Suwarno, 1994. Hamingkubono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974. Yogyakarta: Kanisius.
- Thoha, Miftah (2003), **Birokrasi dan Politik di Indonesia** , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wenstra P, Sutarto dan Ibnu Syamsi. 1982. **Ensiklopedi Administrasi**, Jakarta : Gunung Agung
- Wetherley, R. and M. Lipsky, 1977, **Street-Level Bureaucrats and Institutional Innovation** : Implementing special Education Reform', Harvard Education review, 47(2).
- Winarso, Heru Puji, 2004, **Akuntabilitas Pelayanan Publik**, Komineff Press, Malang.
- Wibawa Samodra, Purbokusumo dan Pramusinto. 1994. **Evaluasi Kebijakan Publik**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang/Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penaturan Mngenai Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pedomam pngelolaan Keuangan Desa.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Ashari, Novian. 2013. *Implementasi Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*. eJournal Ilmu Pemerintahan, 2013, 1 (3): 1135-1144 ISSN 2338-3615, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.

Septiyanto, Utomo dan Sulistiyani. 2013. *Studi Kebijakan Publik Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kendal Selama Tahun 2008-2012*. JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol 1, Nomor 2, Tahun 2013.



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN LEIHITU
NEGERI KAITETU

Alamat Jl. Hatunuku, No 93 Kaitetu 97581

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/143/S-Ket/NK/VIII/2013

Kepala Pemerintah Negeri Kaitetu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IN HUTUELY
Jenis Kelamin : Perempuan
No. Pokok : PO800211414
Identitas : Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Hasanudin

Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian dengan judul *Diskresi Dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kaitetu, 26 Agustus 2013
Kepala Pemerintah Negeri Kaitetu





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
PROGRAM PASCASARJANA FISIP
KAMPUS TAMALANREA

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245 TELP/FAX. (0411) 585024 (PSW. 1165)

Nomor : *6028* /UN4.9.1/PL.02/2013
Lamp. : Proposal Penelitian
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

22 Juli 2013

Yang Terhormat:
Gubernur Maluku
c.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Maluku

Di-

AMBON

Dengan hormat, kami mohon kebijaksanaan Bapak kiranya berkenan memberi izin dan bantuan untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : **In Hutuely**
Nomor Pokok : P0800211414
Program : Magister (S2)
Program Studi : Administrasi Pembangunan
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Judul Tesis : Diskresi Dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah

Pembimbing : Dr. Alwi, M.Si. (Ketua Penasehat)
Dr. Hj. Hasniati, M.Si. (Anggota Penasehat)

Waktu Penelitian : 24 Juli 2013 sampai selesai

Atas izin dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Prof. Dr. Armin, M.Si.
NIP. 19651109 199103 1008

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direktur PPs Unhas (sebagai laporan);
2. Dekan Fisip, Unhas;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Raya Pattimura No. 1 - Lt. V Telp. - Fax. (0911) 351155
AMBON

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 2037 / BKBP / VIII / 2013

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6 / 2 / 12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
3. Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2011.
- b. Menimbang : Surat Wakil Dekan I Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar Nomor : 6028/UN4.9.1/PL.02/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal Permohonan Izin Penelitian.

GUBERNUR, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **IN HUTUELY.**
b. Identitas : Mahasiswa PPs Universitas Hasanuddin - Makassar.
c. No. Pokok : P0800211414
d. Untuk : 1) Melakukan Penelitian dengan judul :
"Diskresi Dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah".
2) Lokasi penelitian : Desa Hila dan Desa Kaitetu Kabupaten Maluku Tengah.
3) Waktu/lama penelitian : 2 (dua) Bulan.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku.
- Melaporkan kepada Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan.
- Surat Rekomendasi ini hanya berlaku bagi kegiatan : *Penelitian*.
- Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian.
- Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat.
- Menyampaikan 1 (satu) Eks. hasil penelitian kepada Gubernur Maluku Cq. Ka. Badan Kesbangpol Prov. Maluku.
- Surat Rekomendasi ini berlaku sampai dengan **1 Oktober 2013**, serta dicabut apabila terdapat penyimpangan/ pelanggaran dari ketentuan tersebut.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ambon, 1 Agustus 2013.

An. GUBERNUR MALUKU
An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI MALUKU
SEKRETARIS,


DRS. JAMES TH. LEIYAKABESSY
PEMBINA
NIP. 19670918 199312 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- Gubernur Maluku di Ambon (sebagai laporan).
- Bupati Maluku Tengah
Cq. Ka. Badan Kesbang dan Politik di Masohi.
- Direktur PPs Universitas Hasanuddin di Makassar.
- Camat Leihitu di Hila.
- Raja Negeri Hila di Hila.
- Raja Negeri Kaitetu di Kaitetu.
- Sdr/i. In Hutueuly.
- Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. (0914) 21101 - 21365 - 22350. Fax (0914) 22350

M A S O H I

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/602.X/BKBPPM

Bupati Maluku Tengah Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menerangkan bahwa :

N a m a : **IN HUTUELY**
Identitas : Mahasiswa Program Pascasarjana
Universitas Hassanudin Makassar
No. Pokok : P0800211414
Judul : **"Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa
di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah."**
Lokasi : Negeri Hila
Negeri Kaitetu
Kecamatan Leihitu
Kabupaten Maluku Tengah
Waktu : 2 (dua) bulan

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis di Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Masohi, 13 Oktober 2013

Kepala Badan
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa



M. TEHUAYO, BA

Pembina

NIP. 19570816 198203 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Imam Bonjol No. 1 (0914) 21101 - 21365 - 22350. Fax (0914) 22350

M A S O H I

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/602/BKBPPM

- A. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 Tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
3. Peraturan Daerah Nomor : 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah.
- B. Menimbang : Surat Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Maluku Nomor : 070/2037/VII/2013, tanggal 01 Agustus 2013 Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

BUPATI, memberikan rekomendasi kepada:

- a. Nama : **IN HUTUELY**
- b. Identitas : Mahasiswa Program Pascasarjana
Universitas Hassanudin Makassar
- c. No. Pokok : P0800211414
- d. Untuk : 1. Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penulisan Tesis Dengan Judul:
"Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah."
2. Lokasi Penelitian : Negeri Hila
Negeri Kaitetu
Kecamatan Leihitu
Kabupaten Maluku Tengah
3. Waktu / Lama Penelitian : 2 (dua) Bulan

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku.
b. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapat petunjuk yang diperlukan.
c. Surat Rekomendasi ini hanya berlaku bagi kegiatan : *Penelitian*.
d. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian.
e. Meperhatikan keamanan dan ketetiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
f. Memparhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat.
g. Menyampaikan 1 (satu) Eksemplar hasil penelitian kepada Bupati Maluku Tengah Cq. Ka. Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Maluku Tengah.
h. Apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut maka Surat Rekomendasi ini akan dicabut.
Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Masohi, 13 Agustus 2013

a.n. Kepala Badan
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

M. TEHUAYO, BA
Pembina
NIP. 19570816 198203 1 017



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN LEIHITU
HILA**

Jln. Raya. Hila.Telp. 361914 Kode Pos. 97581

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/1014/S-KET/CL/VIII/ 2013

Kepala Kecamatan Leihitu dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : IN HUTUELY
- b. Identitas : Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Hasanudin
- c. No.Pokok : PO800211414

Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian dengan judul " **Diskresi dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)**" di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

Hila, 26 agustus 2013


Kepala Kecamatan Leihitu

Dra. S. H. SOUMENA
NIP. 19660415 198603 2 016



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN LEIHITU
NEGERI HILA**

Kantor : Jl. Uli Halawang Hila Kode Pos 97581

SURAT KETERANGAN

No : 420 / 005 / PNH / VIII / 2013

Kepala Pemerintah Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IN HUTUELY
No.Pokok : P0800211414
Mahasiswa : Mahasiswa Program Pasca sarjana unifersitas Hassanudin-
Makasar
Judul : *" Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di
Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah "*
Lokasi : Negeri Hila
Kecamatan Leihitu
Kabupaten Maluku Tengah

Benar Mahasiswa yang namanya tersebut diatas telah menyelesaikan penelitian di Negeri Hila, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, dengan Judul *" Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah "* dalam waktu, 1(satu) Bulan dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hila, 27 Agustus 2013

Kepala Pemerintah Negeri Hila

Drs. ABD. RAHIM OLLONG



DOKUMENTASI









